

LAPORAN RENCANA AKSI KINERJA

BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN
TEROWONGAN KHUSUS
TA 2026



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi	1
1.3. Aspek Strategis serta Isu Strategis yang Sedang Dihadapi.....	3
BAB II PENETAPAN KINERJA	5
2.1. Target Kinerja per Bulan	5
2.2. Target Kinerja per Triwulan	6
BAB III PENUTUP	8
LAMPIRAN	9

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Target Kinerja Rincian Output Per Bulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026.....	5
Tabel 2.2 Target Kinerja Per Bulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026	5
Tabel 2.3 Target Kinerja Rincian Output Per Triwulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026.....	6
Tabel 2.4 Target Kinerja Per Bulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026	7

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi.....	2
--------------------------------------	---

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga Laporan Rencana Aksi Kinerja 2026 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini dapat diselesaikan dan diterbitkan tepat pada waktunya. Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum, yang menegaskan bahwa setiap entitas akuntabilitas di lingkungan Kementerian PU, termasuk unit kerja, wajib melaksanakan penyusunan laporan kinerja secara terukur dan akuntabel.

Laporan Rencana Aksi Kinerja ini disusun dengan tujuan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan program, kegiatan, serta pencapaian sasaran strategis Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus. Dokumen ini memuat target kinerja bulanan sebagai dasar penyusunan Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Bulanan yang tepat sasaran dan tepat waktu.

Ucapan terima kasih dan apresiasi kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah berperan serta dalam proses penyusunan laporan ini. Terima kasih kepada jajaran pegawai Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, serta pihak-pihak lain yang telah memberikan dukungan, masukan, dan pendampingan sehingga laporan ini dapat tersusun dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya, besar harapan kami agar Laporan Rencana Aksi Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini dapat menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan serta peningkatan kinerja di masa yang akan datang. Semoga dokumen ini dapat memberikan manfaat dalam mewujudkan infrastruktur jembatan khusus dan terowongan yang andal, aman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Bandung, 30 Januari 2026
Kepala Balai
Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus,



Armen Adekristi, S.T., MSCE,
NIP. 198410152008011002

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan laporan ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 7 Tahun 2026 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kementerian Pekerjaan Umum, yang menegaskan bahwa setiap entitas akuntabilitas di lingkungan Kementerian PU mulai dari tingkat kementerian, unit organisasi, unit kerja, hingga unit pelaksana teknis berkewajiban untuk menyelenggarakan sistem akuntabilitas kinerja secara menyeluruh, terintegrasi, dan berkelanjutan. Melalui peraturan tersebut, setiap entitas dituntut untuk melaksanakan penyusunan laporan kinerja yang tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mampu menggambarkan tingkat keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi secara terukur, transparan, dan akuntabel.

Pelaksanaan amanat ini juga mencerminkan komitmen Kementerian PU dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*), melalui penerapan prinsip efektivitas, efisiensi, dan orientasi hasil dalam setiap program dan kegiatan. Oleh karena itu, penyusunan Laporan Rencana Aksi Kinerja Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus ini menjadi instrumen penting dalam memperkuat sistem perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan secara publik sesuai dengan kebijakan nasional di bidang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsinya Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus didukung oleh unit-unit kerja yang berada di bawahnya sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum.

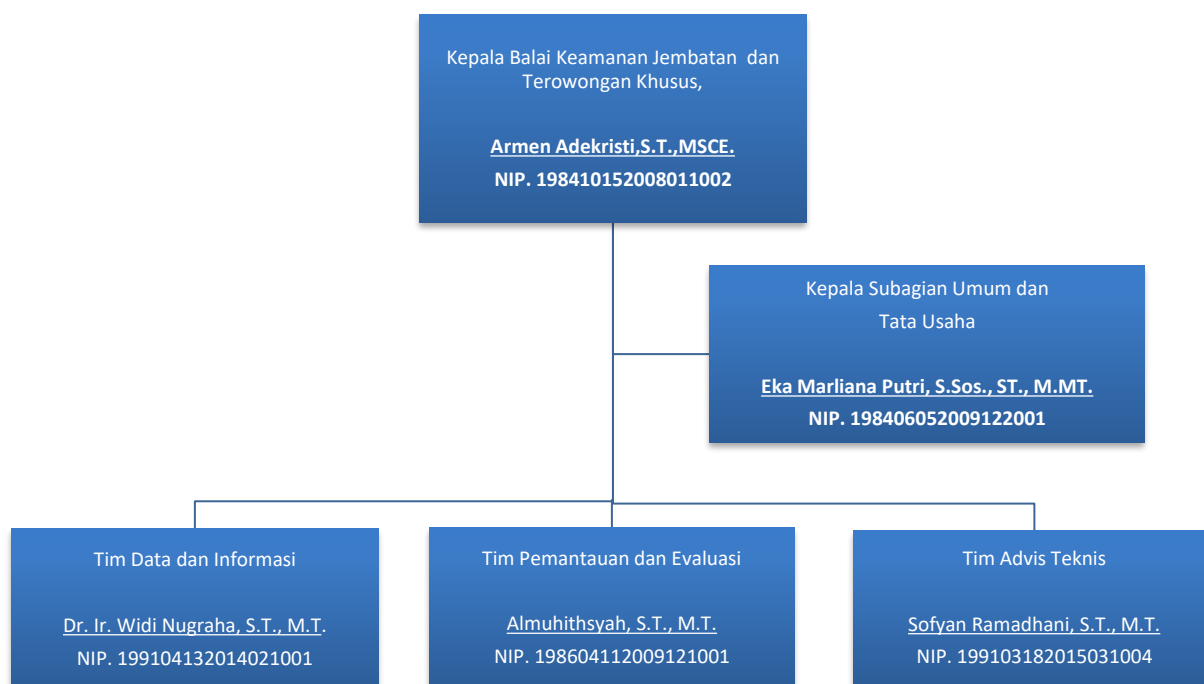
Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus mempunyai tugas melaksanakan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku jembatan khusus dan terowongan, memberikan dukungan administrasi dan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan dan memberikan layanan advis teknis melalui koordinasi dengan Direktorat Pembangunan Jembatan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut sebagaimana tertuang dalam pasal 115 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 16 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan

Umum dan Perumahan Rakyat, Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran;
- b. Penyiapan standar, prosedur, dan kriteria teknis keamanan jembatan dan terowongan khusus;
- c. Pelaksanaan inspeksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- d. Pelaksanaan evaluasi teknis dan pemantauan perilaku serta analisis kondisi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- e. Pelaksanaan inventarisasi, registrasi, dan klarifikasi potensi bahaya terhadap jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- f. Pemberian dukungan administrasi dan dukungan teknis kepada Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan;
- g. Pemberian layanan advis teknis untuk perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi jembatan bentang panjang dan terowongan khusus;
- h. Pelaksanaan dan koordinasi pembangunan zona integritas, pelaksanaan fungsi kepatuhan intern dan manajemen risiko sesuai dengan kewenangannya, serta koordinasi administrasi penerapan sistem pengendalian intern balai; dan
- i. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, umum, barang milik/kekayaan negara, komunikasi publik dan rumah tangga.

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum, Struktur Organisasi Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus, Direktorat Jenderal Bina Marga dapat dilihat dalam Gambar 1.1.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi

1.3. Aspek Strategis serta Isu Strategis yang Sedang Dihadapi

Kementerian Pekerjaan Umum membentuk Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (KKJTJ) untuk memastikan keamanan proyek infrastruktur tersebut saat masa penyiapan pelaksanaan konstruksi, operasional dan pemeliharaan. Komisi ini memberikan rekomendasi terkait keamanan jembatan khusus dan terowongan. Rekomendasi yang diusulkan oleh KKJTJ tersebut berupa sertifikat persetujuan desain, sertifikat persetujuan laik fungsi struktur dan sertifikat persetujuan pemeliharaan. Sebelum sertifikat diterbitkan, surat izin persetujuan desain pelaksanaan konstruksi, surat izin persetujuan operasional dan surat izin persetujuan pemeliharaan harus diterbitkan terlebih dahulu. Sertifikat persetujuan adakalanya belum diterbitkan apabila masih ada catatan yang harus diperbaiki terlebih dahulu oleh Pemilik Jembatan. Jembatan khusus dan terowongan yang harus mendapatkan rekomendasi diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Marga Nomor 13/P/BM/2025 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Keamanan Jembatan Khusus adalah sebagai berikut :

1. Jembatan dengan bentang paling sedikit 100 m;
2. Jembatan pelengkung dengan bentang paling sedikit 60 m, jembatan gantung dan jembatan beruji kabel;
3. Jembatan dengan total panjang paling sedikit 3.000 m;
4. Jembatan dengan ketinggian pilar di atas 40 m;
5. Terowongan jalan dengan panjang bagian tertutup paling sedikit 200m;
6. Terowongan jalan yang menggunakan cara pengeboran/jacking dalam metode pelaksanaan;
7. Jembatan dan terowongan jalan yang memiliki kompleksitas struktur tinggi atau memiliki nilai strategis tinggi atau didesain menggunakan teknologi baru.

Untuk mendukung kegiatan KKJTJ kemudian dibentuklah Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus melalui Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Pekerjaan Umum yang nantinya mempunyai tugas pokok melaksanakan evaluasi teknis dan penyiapan saran teknis jembatan dan terowongan khusus serta pemantauan perilaku jembatan dan terowongan khusus.

Jembatan dan terowongan khusus di Indonesia yang sudah terdata oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus sekitar 235 jembatan dan terowongan khusus, sebanyak 8 jembatan dan terowongan dalam tahap pembahasan desain, 17 dalam tahap konstruksi, 5 jembatan dan terowongan dalam proses laik fungsi, dan 205 dalam tahap layan. Dari jumlah jembatan dan terowongan di atas KKJTJ telah ikut dalam pembuatan rekomendasi izin persetujuan desain terdapat 92 jembatan dan terowongan serta izin persetujuan laik fungsi untuk 76 jembatan dan terowongan baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Pada



tahun anggaran 2025 Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus telah membantu dalam pembuatan rekomendasi izin persetujuan desain untuk 12 jembatan bentang panjang dan terowongan khusus serta izin persetujuan laik fungsi untuk 2 jembatan bentang panjang dan terowongan khusus baik di tingkat daerah maupun tingkat nasional.

Aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (*strategic issues*) yang dihadapi oleh Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus pada tahun anggaran 2026 adalah efisiensi anggaran di tengah banyaknya pengajuan sertifikasi persetujuan desain dan persetujuan laik fungsi struktur. Untuk menjawab isu strategis yang berkembang, dilakukan percepatan sertifikasi persetujuan desain dan laik fungsi struktur jembatan dan terowongan khusus secara daring, agar tetap memastikan bahwa infrastruktur yang dibangun memiliki kualitas yang andal ditengah tantangan efisiensi anggaran.

BAB II PENETAPAN KINERJA

2.1. Target Kinerja per Bulan

Pada subbab ini memuat terkait target indikator kinerja kegiatan beserta target rincian output yang mendukungnya untuk tahun anggaran 2026.

Tabel 2.1 Target Kinerja Rincian Output Per Bulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026

No	Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Rincian Output	Target PK	Satuan	Target Capaian Per Bulan (%)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		SK: Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
1		Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	2.12	6.50	13.03	19.46	28.52	44.10	60.49	71.12	83.01	90.67	96.12	100.00
	ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan			2.12	6.50	13.03	19.46	28.52	44.10	60.49	71.12	83.01	90.67	96.12	100.00
		SK: Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis														
1		Tingkat dukungan manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05	%	0.30	6.98	14.67	21.97	29.21	36.87	43.93	51.36	70.22	77.29	84.15	100.00
	EBA.962	Layanan Umum			2,77	6,93	13,86	24,95	33,52	46,25	54,61	67,14	81,65	89,97	95,51	100,00
	EBA.994	Layanan Perkantoran			0,18	6,99	14,71	21,83	29,01	36,43	43,42	50,62	69,68	76,69	83,61	100,00

Sumber : i-eMonitoring/SiPP

Tabel 2.2 Target Kinerja Per Bulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026

No	Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Rincian Output	Target PK	Satuan	Target Capaian Per Bulan (%)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
		SK: Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
1		Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	2.12	6.50	13.03	19.46	28.52	44.10	60.49	71.12	83.01	90.67	96.12	100.00
	ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan			2.12	6.50	13.03	19.46	28.52	44.10	60.49	71.12	83.01	90.67	96.12	100.00
	404.AA	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan			0,78	3,52	7,09	11,90	18,39	45,19	73,00	82,37	88,97	92,99	96,14	100,00
	404.AB	Advis dan Layanan Teknis Jembatan dan Terowongan Jalan			1,55	6,42	12,94	21,92	34,22	38,66	55,67	70,19	80,62	87,93	93,53	100,00

No	Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Rincian Output	Target PK	Satuan	Target Capaian Per Bulan (%)											
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Aug	Sept	Okt	Nov	Des
	405.AA	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan			2,93	8,12	16,24	23,17	33,16	44,30	54,45	65,20	80,15	89,81	96,48	100,00
SK: Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis																
1		Tingkat dukungan manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05	%	0,30	6,98	14,67	21,97	29,21	36,87	43,93	51,36	70,22	77,29	84,15	100,00
	EBA.962	Layanan Umum			2,77	6,93	13,86	24,95	33,52	46,25	54,61	67,14	81,65	89,97	95,51	100,00
	235.AD	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan			2,77	6,93	13,86	24,95	33,52	46,25	55,06	67,79	81,65	89,97	95,51	100,00
	235.AE	Pengelolaan Kepegawaian			2,77	6,93	13,86	24,95	33,52	46,25	55,06	67,79	81,65	89,97	95,51	100,00
	235.AF	Penyelenggaraan ZI, MR dan SMAP			2,77	6,93	13,86	24,95	33,52	46,25	54,21	66,56	81,65	89,97	95,51	100,00
	EBA.994	Layanan Perkantoran			0,18	6,99	14,71	21,83	29,01	36,43	43,42	50,62	69,68	76,69	83,61	100,00
	001.AG	Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK			0,00	5,54	14,26	19,43	23,94	29,30	34,62	39,95	45,27	53,08	60,76	100,00
	002.AH	Operasional Perkantoran			0,94	7,02	16,14	24,81	33,90	43,36	51,59	61,52	70,40	78,87	87,14	100,00
	002.AI	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya			0,02	8,30	16,68	25,01	33,38	41,80	50,08	58,55	66,90	75,20	83,48	100,00
	002.AJ	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			0,37	4,09	8,55	12,63	17,06	21,83	25,52	28,80	92,82	94,83	96,67	100,00
	002.AK	Penanganan Bencana Sumatera			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	40,00	60,00	80,00	100,00

Sumber : i-eMonitoring/SiPP

2.2. Target Kinerja per Triwulan

Disajikan target kinerja per Triwulan untuk masing masing IKK sampai dengan paket pekerjaan.

Tabel 2.3 Target Kinerja Rincian Output Per Triwulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026

No	Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Rincian Output	Target PK	Satuan	Target Capaian Per Triwulan (%)			
					I	II	III	IV
SK: Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan								
1		Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	13.03	44.10	83.01	100,00
	ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan			13.03	44.10	83.01	100,00
SK: Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis								
1		Tingkat dukungan manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05	%	14.67	35,14	70.22	100,00
	EBA.962	Layanan Umum			13,86	46,95	81,65	100,00
	EBA.994	Layanan Perkantoran			14,71	34,66	69,68	100,00

Sumber : i-eMonitoring/SiPP

Tabel 2.4 Target Kinerja Per Bulan Balai Keamanan Jembatan dan Terowongan Khusus TA. 2026

No	Kode	Sasaran Kegiatan/Indikator Kinerja Kegiatan/Rincian Output	Target PK	Satuan	Target Capaian Per Triwulan (%)			
					I	II	III	IV
		SK: Meningkatnya Kinerja Pengaturan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan						
1		Tingkat kinerja pelayanan keteknikan bidang jalan dan jembatan	100	%	13.03	44.10	83.01	100,00
	ABF.001	Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan			13.03	44.10	83.01	100,00
	404.AA	Pemantauan dan Evaluasi Jembatan dan Terowongan Jalan			7,09	45,19	88,97	100,00
	404.AB	Advis dan Layanan Teknis Jembatan dan Terowongan Jalan			12,94	38,66	80,62	100,00
	405.AA	Dukungan Teknis Komisi Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan			16.24	44.30	80.15	100,00
		SK: Layanan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja Dan Unit Pelaksana Teknis						
1		Tingkat dukungan manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87,05	%	14.67	36.87	70.22	100,00
	EBA.962	Layanan Umum			13,86	46,25	81,65	100,00
	235.AD	Administrasi Kegiatan Satker Balai Jembatan			13,86	46,25	81,65	100,00
	235.AE	Pengelolaan Kepegawaian			13,86	46,25	81,65	100,00
	235.AF	Penyelenggaraan ZI, MR dan SMAP			13,86	46,25	81,65	100,00
	EBA.994	Layanan Perkantoran			14,71	36,43	69,68	100,00
	001.AG	Uang Makan dan Lembur PNS dan PPPK			14,26	29,30	45,27	100,00
	002.AH	Operasional Perkantoran			16,14	43,36	70,40	100,00
	002.AI	Langganan Daya dan Jasa Operasional Lainnya			16,68	41,80	66,90	100,00
	002.AJ	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor			8,55	21,83	92,82	100,00
	002.AK	Penanganan Bencana Sumatera			0.00	0.00	40.00	100,00

Sumber : i-eMonitoring/SiPP

BAB III PENUTUP

Rencana Aksi Kinerja adalah suatu rencana kegiatan yang lebih terperinci untuk menerjemahkan strategi-strategi dan arahan pembangunan yang telah diindikasikan dalam rencana strategis ke dalam program-program atau proyek pembangunan.

Rencana Aksi Kinerja disusun untuk melakukan monitoring terhadap proses pencapaian kinerja dan alat untuk memprediksi sedini mungkin hambatan - hambatan yang mungkin muncul yang akan menyebabkan kinerja yang diharapkan tidak tercapai. Oleh sebab itu perlu disusun target capaian untuk mempermudah dalam proses pencapaian kinerja. Target yang ditetapkan merupakan target penyelesaian proses pelaksanaan fisik di lapangan (progress pencapaian output) yang disesuaikan dengan kemampuan sumber daya unit kerja.

Target pencapaian masing-masing output kegiatan ditetapkan per bulan dan dapat direvisi bila terdapat ketidak sesuaian antara rencana dan realisasi.

Dengan dilakukan penyusunan Rencana Aksi Kinerja diharapkan sasaran kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja TA. 2026 dapat sepenuhnya tercapai.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : ARMEN ADEKRISTI
Jabatan : KEPALA SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : ROY RIZALI ANWAR
Jabatan : DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

- PIHAK PERTAMA pada tahun 2026 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

ROY RIZALI ANWAR

JAKARTA, 30 JANUARI 2026

PIHAK PERTAMA

ARMEN ADEKRISTI



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM / SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2026
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan	IKP : Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan	
	IKK : Tingkat kinerja pelayanan ke teknikn bidang jalan dan jembatan	100.00 %
	Rincian Output	
ABF.001	Layanan Keteknikn Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi Kebijakan
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)	
Layanan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Unit Kerja dan Unit Pelaksanaan Teknis	IKK : Tingkat Dukungan Manajemen Balai Teknik Bidang Jalan dan Jembatan	87.05 %
	Rincian Output	
EBA.962	Layanan Umum	1.00 Layanan
EBA.994	Layanan Perkantoran	1.00 Layanan

Kegiatan:

1. Pengaturan dan Pembinaan Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan

2. Dukungan Manajemen Ditjen Bina Marga

Total Anggaran:

Anggaran:

Rp. 5,690,182,000

Rp. 2,749,459,000

Rp. 8,439,641,000

DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA

ROY RIZALI ANWAR

JAKARTA, 30 JANUARI 2026

KEPALA SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS

ARMEN ADEKRISTI



RakapOutput Output. Hal. 1 dari 1

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
SATKER BALAI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN KHUSUS
DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
						8,439,641	Total Anggaran
Meningkatnya kualitas bisnis proses penyelenggaraan jalan dan jembatan						5,690,192	
Tingkat efektivitas kinerja proses bisnis penyelenggaraan jalan dan jembatan						5,690,192	
	ABF.001.Layanan Keteknikan Bidang Jalan dan Jembatan	1.00 Rekomendasi				5,690,192	
			404	Avis dan Layanan Teknis		2,305,583	
		1.00 Laporan		AA PEMANTAUAN DAN EVALUASI JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	1,821,054	
		1.00 Laporan		AB ADVIS DAN LAYANAN TEKNIS JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	484,529	
			405	Layanan Data Dan Informasi		3,384,599	
		1.00 Laporan		AA DUKUNGAN TEKNIS KOMISI KEAMANAN JEMBATAN DAN TEROWONGAN JALAN	KOTA BANDUNG	3,384,599	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 1 dari 2

SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA / RINCIAN OUTPUT	VOLUME	KOMPONEN	SUB KOMPONEN	LOKASI	ANGGARAN (Dalam Ribuan Rp)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Meningkatnya Dukungan Manajemen Kementerian PU dan Tugas Teknis Lainnya						2,749,459	
Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya (DJBM)						2,749,459	
	EBA.962.Layanan Umum	1.00 Layanan				123,958	
			235	Penyusunan Laporan Keuangan Bmn		123,958	
				AD ADMINISTRASI KEGIATAN SATKER BALAI JEMBATAN	KOTA BANDUNG	54,403	
				AE PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN	KOTA BANDUNG	3,811	
				AF PENYELENGGARAAN ZONA INTEGRITAS MANAJEMEN RESIKO DAN SMAP	KOTA BANDUNG	65,744	
	EBA.994.Layanan Perkantoran	1.00 Layanan				2,625,501	
			001	Gaji dan Tunjangan		330,060	
				AG UANG MAKAN DAN LEMBUR PNS DAN PPPK	KOTA BANDUNG	330,060	
			002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor		2,295,441	
				AH OPERASIONAL PERKANTORAN	KOTA BANDUNG	269,060	
				AI LANGGANAN DAYA DAN JASA OPERASIONAL LAINNYA	KOTA BANDUNG	1,557,680	
				AJ PEMELIHARAAN SARANA DAN PRASARANA KANTOR	KOTA BANDUNG	468,701	

Lampiran Catatan Kaki, Hal. 2 dari 2

2. Berita Acara Target IKK Perjanjian Kinerja

[illegible]